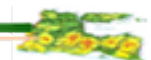




Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

MISI 1 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas, produktivita, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja.	1. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, program AYO KERJA (bursa kerja online) , job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 2. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,78	66,68	1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jember 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Pasuruan 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Mojokerto 7. Program Peningkatan	Ketenaga-kerjaan	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi



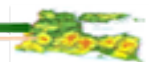


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			(NAKERMEN) dan Desa Migran Produktif 3. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) menuju standar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi serta penempatan alumni siswa UPT BLK melalui Bursa Kerja Khusus. 4. Strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen		67,00	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jombang 8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tuban 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk 10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Surabaya 11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep 12. Program Peningkatan Kualitas dan		



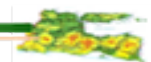


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			tinggi serta mendukung "link and match" antara calon pekerja dan perusahaan dalam rangka melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja					Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Situbondo	Ketenaga-kerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			5. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif					13. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri		
			6. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan					14. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Tulungagung		
								15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun		
								16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Ponorogo		
								17. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK		





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			<p>pengawasan terpadu serta melakukan fasilitasi dan pembinaan di sektor Penempatan TKI formal maupun informal</p> <p>7. Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa</p>					<p>Bojonegoro</p> <p>18. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang</p> <p>19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>20. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di UPT P3TKI</p>	<p>Ketenaga-kerjaan</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>
									<p>Ketenaga-kerjaan</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>



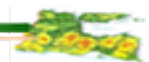


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru 2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Persentase peningkatan pendapatan pekerja di Jawa Timur	Persen		9,5	21. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 22. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 23. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UPT K3 Surabaya	Ketenaga-kerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas	Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Indeks Pendidikan	Indeks	0,57	0,63	24. Program Pendidikan Menengah Atas 25. Program Pendidikan Menengah Kejuruan 26. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya 27. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik	Pendidikan	Dinas Pendidikan





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
		dan tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan.	2. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah 3. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah 4. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi 5. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan					28. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo 29. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto 30. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang 31. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang 32. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu 33. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro 34. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban 35. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan 36. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun 37. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi 38. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan 39. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo 40. Program Manajemen	Pendidikan	Dinas Pendidikan



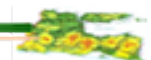


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			sekolah khusus					Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan 41. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri 42. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk 43. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar 44. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung 45. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek 46. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan 47. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo 48. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang 49. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember 50. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso 51. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo 52. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan



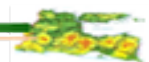


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Wilayah Banyuwangi 53. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan 54. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang 55. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan 56. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep 57. Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Pendidikan	Dinas Pendidikan



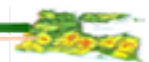


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
4	Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur	Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu	Indeks Minat Baca	Indeks	56,05	74	58. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan 59. Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 60. Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Meningkatnya mutu pendidikan tenaga kependidikan	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan	1. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata 2. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas 3. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi 4. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	Persen	92,36	99	61. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK 62. Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan 63. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) 64. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan 65. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
6	Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap	Angka Kematian Ibu (AKI)	per seribu penduduk	97,39	86,00	66. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 67. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB)	per seribu penduduk	25,00	22,00			
				Persentase Stunting	Persen	29,2	23,00			





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
		balita	desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).							
7	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. Meningkatkan standard kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya 2. Meningkatkan kesehatan masyarakatber basis keluarga dan masyarakatme lalui upaya promotif dan preventif	1. Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata 2. Peningkatan pelayanan Kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif	AHH	Tahun	70,34	72,70	68. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persen	88,00	80,00	69. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan		
				Persentase RFT Rate Kusta	Persen	88,00	95,00	70. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan		
				Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	Persen	72,00	83,00	71. Program Pengendalian Penyakit		
				Persentase keberhasilan pengobatan TB	Persen	90,00	93,00	72. Program Pelayanan Kesehatan Primer 73. Program Pengembangan Kesehatan Tradisional 74. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 75. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 76. Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta 77. Progam Pencegahan dan Pengendalian HIV 78. Progam Pencegahan dan Pengendalian TB 79. Program Upaya Kesehatan Keluarga		





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								80. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 81. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
								82. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 83. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	Rumah Sakit Paru Jember
								84. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 85. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
								86. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 87. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun
								88. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 89. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 90. Program Pencegahan dan Pengendalian TB	Kesehatan	Rumah Sakit Paru Surabaya
								91. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Kediri





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								(BLUD) 92. Program Pembinaan Lingkungan Sosial		
								93. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 94. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
								95. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 96. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
								97. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 98. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Muhammad Noer Pamerkesan
								99. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	Akademi Keperawatan Madiun
								100. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	Akademi Gizi Surabaya (AKZI SURABAYA)
								101. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati - Lawang
								102. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum	Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya



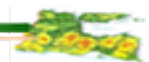


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Daerah (BLUD) 103. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		
								104. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 105. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
								106. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 107. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang
								108. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 109. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
								110. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 111. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Kesehatan	Rumah Sakit Haji Surabaya





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
8	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum, dan sanitasi yang layak serta ketersediaan perumahan	1. Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak 2. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persen		78,14	112. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 113. Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh dan perbatasan 114. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 115. Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan 116. Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman 117. Program Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
9	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas 2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi	1. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan 2. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Persen	16,62	18,19	118. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 119. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
				Jumlah Atlet Yang berprestasi	Orang		1288	120. Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan		





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
		muda 3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai even	penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS 3. Peningkatan prestasi olahraga					121. Olahraga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga		
10	Menurunnya presentase penduduk miskin	Meningkatkan keterpaduan antar kelompok program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan fokus dan lokus tertentu, berbasis perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses, jangkauan dan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja organisasi pemerintah daerah (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	Persen		85,00	122. Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan	Persen		0,40	123. Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa		
								124. Program Peningkatan kerjasama desa		
								125. Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan		
			2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin	Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	Persen		83,00	126. Program Ketransmigrasian	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan					127. Program Ketransmigrasian di UPT Pelatihan Ketransmigrasian dan Kemasyarakatan		





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			<p>kemampuan dan pendapatan penduduk miskin</p> <p>4. Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah</p> <p>5. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah</p> <p>6. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin</p> <p>7. Peningkatan</p>							



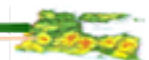


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			<p>infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan</p> <p>8. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah</p> <p>9. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin</p> <p>10. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat,</p>							



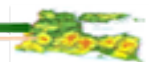


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			<p>diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil</p> <p>11. Peningkatan kapasitas lembaga - lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.</p> <p>12. Peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam hal administrasi dan keuangan melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah</p> <p>13. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan perekonomian desa dan kawasan perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah</p>							



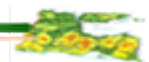


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.							
11	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen		1,47	128. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 129. Program Pemberdayaan Sosial 130. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 131. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 132. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 133. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 134. Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang 135. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial	Sosial	Dinas Sosial



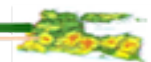


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Asuhan Balita Sidoarjo		
								136. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek		
								137. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo		
								138. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep		
								139. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk		
								140. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu		
								141. Program Kesejahteraan Sosial		



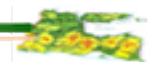


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang		
								142. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar		
								143. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan		
								144. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar		
								145. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang		
								146. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan		
								147. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan		
								148. Program Kesejahteraan Sosial		



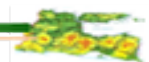


NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban 149. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan 150. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan 151. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri 152. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan 153. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo 154. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun 155. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial		





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Bina Lara Kronis Tuban		
								156. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri		
								157. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya		
								158. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro		
								159. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan		
								160. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember		
								161. Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi		
								162. Program		





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso 163. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis 164. Program Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang		
								165. Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian 166. Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 167. Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 168. Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								169. Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial		
12	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,77	72,89	170. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
				2. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur	Persen		25,00	171. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		
				3. Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen		0,64	172. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)		
				4. Cakupan KB Aktif/ CPR (%)	Persen		71	173. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

